

Bab 1: Konteks dan Tantangan

Kepemimpinan Akar Rumput dan Pendidikan Populer di Indonesia

Renungan dan Saran dari Gerakan untuk Perubahan Sosial dan Lingkungan

berdasarkan hasil wawancara dan percakapan
dengan lusinan pemimpin dan tetua adat,
aktivis, pendidik serta pengembang gerakan



Ditulis oleh: Serge Marti

Sebuah Publikasi dari The Samdhana Institute dan LifeMosaic

Bab 1: Konteks dan Tantangan

Kepemimpinan Akar Rumput dan Pendidikan Populer di Indonesia

Renungan dan Saran dari Gerakan untuk Perubahan Sosial dan Lingkungan

Kepemimpinan Akar Rumput dan Pendidikan Populer di Indonesia adalah sebuah publikasi baru dari LifeMosaic dan The Samdhana Institute. Buku ini bertujuan untuk menganalisis dan memberi rekomendasi upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mendukung pengembangan kepemimpinan akar rumput dan pendidikan populer untuk memperkuat gerakan-gerakan untuk perubahan sosial dan lingkungan.

Buku ini ditujukan untuk para pemimpin akar rumput, aktivis, pendidik dan pengembang gerakan di Indonesia dan di tempat-tempat lainnya, untuk siapa saja yang berpartisipasi dalam perubahan sistemik untuk mewujudkan masa depan yang lebih adil dan lestari, dengan harapan bahwa isi buku ini akan menjadi pemantik yang memercikkan energi dalam perjalanan Anda.

Silakan membaca **Bab 1: Konteks dan Tantangan** ini.

Bab Pendahuluan dan Ringkasan buku ini telah ditayangkan di [sini](#). Bab 2: Krisis Kepemimpinan akan ditayangkan bulan April. Bab-bab selanjutnya akan ditayangkan berseri sepanjang tahun 2015. Versi lengkap buku ini akan dipublikasikan sesudah serialisasi. Untuk menerima bab-bab selanjutnya, daftarkan alamat surat elektronik (*email*) Anda menggunakan formulir 'Bergabung di milis kami' dalam laman www.lifemosaic.net.

Silakan kirim komentar, kritik, dan cerita-cerita Anda melalui surel ke leadership@lifemosaic.net, atau tinggalkan komentar di facebook dan twitter LifeMosaic.

Foto sampul: oleh Nanang Sujana, anak Malind yang menderita kekurangan gizi di daerah perluasan hutan tanaman industri, Zanegi, Merauke, Papua.

Daftar Isi

1. Konteks dan Tantangan	4
Konteks Global.....	4
<i>Demam Sumber Daya.....</i>	<i>4</i>
<i>Batasan-Batasan Planet.....</i>	<i>5</i>
<i>Keanekaragaman Hayati dan Budaya Berada Dalam Krisis</i>	<i>7</i>
<i>Peningkatan Ketidaksetaraan</i>	<i>7</i>
Konteks Indonesia	8
<i>Kemajuan Terbatas.....</i>	<i>8</i>
<i>Perluasan Agrobisnis dan Industri Ekstraktif yang Terus Berlangsung</i>	<i>9</i>
<i>Erosi Budaya dan Sosial.....</i>	<i>10</i>
<i>Konflik.....</i>	<i>10</i>
<i>Urbanisasi.....</i>	<i>10</i>
Kelemahan-Kelemahan dalam Gerakan-Gerakan di Indonesia.....	11
<i>Kurangnya Investasi untuk Analisis Kritis.....</i>	<i>11</i>
<i>Pelatihan versus Pendidikan Populer</i>	<i>12</i>
<i>Kurangnya Sumberdaya untuk Kepemimpinan Akar Rumput.....</i>	<i>12</i>
<i>Jebakan Ketergantungan LSM</i>	<i>12</i>
<i>Kurangnya Penguatan Struktur Tradisional.....</i>	<i>13</i>
<i>Jebakan Uang.....</i>	<i>14</i>
<i>Kampanye Reaktif.....</i>	<i>14</i>
Pemikiran Monokultur.....	15
<i>Tidak Ada Alternatif (TAA).....</i>	<i>15</i>
<i>Monokultur Pikiran.....</i>	<i>16</i>
Memungkinkan untuk Menciptakan Dunia Lain.....	17
<i>Menekan Balik.....</i>	<i>17</i>
<i>Memperkuat Gerakan dan Kepemimpinan di Indonesia.....</i>	<i>19</i>

1. Konteks dan Tantangan

Bab ini akan mengulas tantangan-tantangan yang belum pernah dihadapi sebelumnya oleh masyarakat, gerakan sosial, dan ekosistem Indonesia. Tantangan-tantangan ini mencakup:

- *Demam* global atas sumber daya yang semakin langka; risiko-risiko terjadinya pelanggaran berbagai batasan planet yang telah memungkinkan kehidupan manusia di bumi; meningkatnya ketidaksetaraan; dan hilangnya keanekaragaman hayati dan budaya dalam jumlah besar.
- Konteks Indonesia di mana proses pengakuan hak-hak masyarakat terhalang oleh pembebasan lahan skala besar dan peningkatan konflik agraria.
- Berbagai kritik atas model-model transformasi sosial dan lingkungan yang bersifat *top-down* (dari atas ke bawah), yang diidentifikasi oleh para narasumber yang diwawancara dan peserta lokakarya.
- Pengaruh dari doktrin yang mengatakan bahwa *Tidak Ada Alternatif* untuk ekonomi neoliberal dan globalisasi.

Meskipun demikian, bab ini diakhiri dengan catatan positif yang menunjukkan bagaimana berbagai alternatif terus diciptakan di seluruh dunia meskipun menghadapi tantangan-tantangan tersebut.

Konteks Global

Demam Sumber Daya

Ekonomi global akan meningkat tiga kali lipat ketika penduduk dunia mencapai 9 miliar pada tahun 2050. Hal ini berdasarkan asumsi skenario *business-as-usual* yang mempertahankan gaya hidup yang sarat sumber daya di negara-negara industri sementara negara-negara berkembang juga bergerak menuju pola konsumsi yang sama. Yang mendorong ekspansi tersebut adalah pertumbuhan pesat kelas menengah, yang disertai dengan peningkatan konsumsi per kapita dan permintaan atas lebih banyak barang-barang konsumsi serta makanan tinggi emisi karbon yang berbahan dasar protein hewani dan makanan cepat saji.

Sejak tahun 2000, minimal 30 sampai 50 juta hektar tanah di negara-negara berkembang telah dijual, disewakan atau sedang dinegosiasi, utamanya dengan investor internasional. Meski demikian, angka yang mengejutkan tersebut mungkin jauh lebih kecil dari yang sebenarnya karena kurangnya transparansi dan kesulitan mendapatkan data dari banyak transaksi tanah. Dan laju transaksi tanah terus meningkat; sebagian besar pembebasan tanah tersebut terjadi dalam waktu dua tahun terakhir. Separuh dari perampasan tanah terjadi di Afrika. Target perampasan tanah terbesar kedua adalah Asia Tenggara, khususnya Indonesia.¹

Beberapa penyebab pembebasan tanah skala besar di antaranya adalah peningkatan permintaan atas pangan, bahan bakar nabati dan produk pertanian bukan pangan lainnya

¹ Anseeuw, W, dkk. (2012) *Land Rights and the Rush for Land: Findings of the Global Commercial Pressures on Land Research Project*, Rome: International Land Coalition, hal.4.

serta mineral, kayu, dan kredit penyerapan karbon.² Pariwisata dan urbanisasi juga telah menyumbang dampak negatif.

Perbankan tanah dan air – mengamankan kontrol atas sumber daya untuk penggunaan di masa mendatang dan juga untuk spekulasi – saat ini juga meningkat pesat. Penelitian Bank Dunia di tahun 2001 atas transaksi tanah skala besar yang mencakup 56 juta hektar menunjukkan bahwa 80 persen dari transaksi tersebut belum memulai aktivitas produktif apapun.³

Batasan-Batasan Planet

Peningkatan permintaan sumber daya yang pesat ini turut berkontribusi pada persoalan lingkungan, sosial, dan ekonomi global terhadap umat manusia. Persoalan yang paling terkenal dari masalah-masalah global ini adalah perubahan iklim dengan potensi bencana yang dibawanya.

Namun, para ilmuwan telah mengidentifikasi *sembilan* rangkaian keterbatasan biofisik yang selama tidak dilampaui membuat manusia bisa bertahan hidup dengan aman di planet ini, di mana perubahan iklim hanyalah salah satu di antaranya. Lingkaran biru di tengah gambar di bawah menunjukkan wilayah aman (*safety zone*) dari masing-masing sistem tersebut, sementara bagian berwarna merah dan jingga menunjukkan sejauh mana kita sudah merambah batasan-batasan yang bisa diterima.

Sekarang empat dari sembilan batasan planet telah dilanggar akibat ulah manusia. [...] Keempatnya adalah: perubahan iklim, hilangnya integritas biosfer, perubahan sistem lahan (misalnya penebangan hutan), dan perubahan siklus biogeokimia (fosfor dan nitrogen).⁴

Pelanggaran batas-batas ini meningkatkan risiko bahwa kegiatan manusia dapat membuat bumi menjadi tidak bersahabat secara tiba-tiba, *merusak upaya untuk mengurangi kemiskinan, dan menyebabkan kemerosotan kesejahteraan manusia di berbagai belahan dunia.*⁵

Pada bulan Mei 2013, konsentrasi CO₂ di atmosfer untuk pertama kalinya mencapai 400 bagian per juta. Tingkat setinggi itu mungkin tidak dicapai sejak pertengahan zaman Pliosen atau empat juta tahun yang lalu, ketika temperatur rata-rata global hanya 2-3°C lebih tinggi dan permukaan laut 25 m lebih tinggi dari hari ini.⁶

² *Ibid.*

³ Deininger, K. dkk. (2011) *Rising Global Interest in Farmland: Can it Yield Sustainable and Equitable Benefits?* Washington: World Bank.

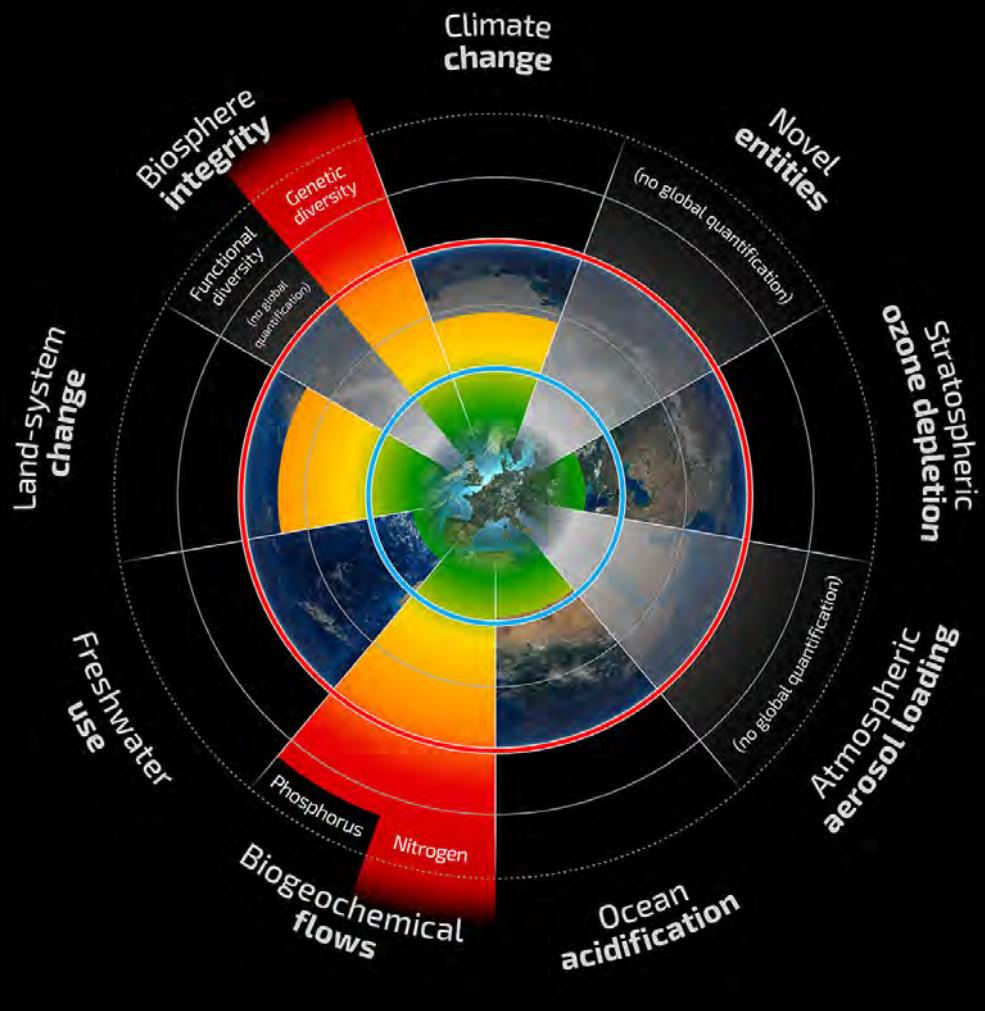
⁴ Will Steffen, Planetary Boundaries 2.0 – new and improved (2015) Stockholm Resilience Centre, <http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-news/1-15-2015-planetary-boundaries-2.0---new-and-improved.html> Diakses pada bulan Februari 2015.

⁵ *Ibid*

⁶ Dwyer, G.S., dan M.A. Chandler (2009) *Mid-Pliocene sea level and continental ice volume based on coupled benthic Mg/Ca palaeotemperatures and oxygen isotopes*, Philosophical Transactions of the Royal Society A: 367, hal.157–168; Robinson, M., H.J. Dowsett, dan M.A. Chandler (2008) *Pliocene role in assessing future climate impacts*, Eos, Transactions American Geophysical Union 89, hal.501–502.

Planetary Boundaries

A safe operating space for humanity



- Beyond zone of uncertainty (high risk)
- In zone of uncertainty (increasing risk)
- Below boundary (safe)
- Boundary not yet quantified

Source: Steffen et al. Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet, *Science*, 16 January 2015.
Design: Globala

Gambar 1: Batasan-batasan Planet⁷

Kelompok pengkampaye untuk iklim 350.org mengumpulkan data untuk menunjukkan parahnya situasi ini. Agar memiliki 50% peluang untuk bertahan di bawah 2 derajat pemanasan, umat manusia hanya boleh mengeluarkan emisi karbon dioksida sebesar 565 giga ton, hanya 14 tahun emisi lagi dari laju yang diprediksikan. Namun, perusahaan-perusahaan energi besar memiliki cadangan bahan bakar minyak yang jika digunakan akan mengeluarkan emisi sebesar 2.795 gigaton, *lima kali lipat dari jumlah yang aman*.⁸

⁷ Steffen W. et al. (2015) *Planetary Boundaries: Guiding human development on a changing planet*. *Science*, Vol 347 (6223).

⁸ 350.org (2013) *Do the Math tour*. Situs: <http://math.350.org/> Diakses pada bulan Juni 2013.

Keanekaragaman Hayati dan Budaya Berada Dalam Krisis

Ketidaklestarian demam sumber daya global telah membawa keruntuhan, baik dalam hal keanekaragaman hayati maupun budaya. Alam sedang mengalami Kepunahan Holosen, yang juga disebut sebagai *Kepunahan Besar Keenam*. Jika laju kepunahan ini berlanjut, para ilmuwan memperkirakan bahwa kita akan kehilangan separuh dari hewan-hewan dan tanaman di planet kita menjelang tahun 2100.⁹

Pada saat yang sama para antropolog, ahli bahasa dan ahli biologi menemukan korelasi kuat antara keanekaragaman hayati dan budaya, umat manusia juga kehilangan keanekaragaman bahasa dan budaya dengan cepat. Sekitar separuh dari berbagai bahasa yang ada akan hilang menjelang tahun 2100, bersama pengetahuan tradisional tentang ekologi yang menyertainya.¹⁰

Karena keanekaragaman hayati dan budaya berkurang, ekosistem dan budaya manusia juga menjadi kurang bisa beradaptasi, seperti halnya ekosistem yang rusak membuat kita harus menjadi lebih lenting dari sebelumnya.

Peningkatan Ketidaksetaraan

Di dalam logika sistem tata kelola ekonomi global saat ini, krisis lingkungan diubah menjadi *kesempatan* yang spekulatif. Berputar-putar dalam lingkaran setan, berkurangnya sumber daya mendorong meningkatnya harga komoditas dan laba yang lebih besar serta pengurangan sumber daya lebih lanjut. Pada bulan Agustus 2012, dihadapkan pada kemarau terburuk di AS sejak tahun 1930-an, volatilitas dalam harga pangan global yang diakibatkannya dielu-elukan oleh kepala divisi pertanian perusahaan perdagangan komoditas terbesar di dunia sebagai situasi yang *bagus untuk Glencore* (nama perusahaannya).¹¹

Dalam proses perampasan tanah yang terjadi saat ini, para investor dari negara-negara utara juga disertai oleh para investor dari negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat, seperti China, Arab Saudi, Korea Selatan, Malaysia, Brasil, dan Indonesia. Dalam konteks ini, seruan tradisional untuk memperbaiki situasi ketidakadilan Utara/Selatan menjadi kurang relevan dibandingkan dengan semakin lebarnya jurang antara si miskin dan si kaya dalam suatu negara serta secara global. Ekonomi nasional juga semakin banyak dikontrol oleh modal transnasional yang dimiliki oleh segelintir orang kaya.

Occupy Movement di seluruh dunia baru-baru ini melakukan penolakan dari 99% mayoritas penduduk dunia untuk *membayar kesalahan yang dilakukan segelintir minoritas*.¹² Laporan Oxfam tahun 2014 memberi informasi lebih detil tentang meningkatnya ketidaksetaraan:¹³

⁹ Celâl Sengör, A.M., Atayman, Saniye dan Sinan Özeren (2008) A scale of greatness and causal classification of mass extinctions: Implications for mechanisms. Proceedings of the National Academy of Sciences 105 no. 36; Eldredge, N. (2001) *The SixthExtinction*. Situs: <http://www.actionbioscience.org/newfrontiers/eldredge2.html> Diakses pada bulan Juni 2013.

¹⁰ Johnson, K. (2010) *The Sixth Great Extinction: The Sixth Great Extinction and its Effects on Humanity*, Izilwane. Situs: <http://www.izilwane.org/the-sixth-great-extinction.html> Diakses pada bulan Juni 2013.

¹¹ Bawden, T. (2012) *Unholy trade of making millions out of misery*, The Independent, 23 Agustus, 2012.

¹² Anon, *We are the 99%*. Situs: <http://wearethe99percent.tumblr.com/> Diakses pada bulan Februari 2013.

¹³ Oxfam (2014) hal.2 [richest 85 people in the world]-3, Working for the Few. Political Capture and Economic Inequality, Oxfam Briefing Paper no.178 Web: <http://www.oxfam.org/sites/www.oxfam.org/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-en.pdf> Diakses pada bulan Mei 2014.

- Hampir separuh dari kekayaan dunia (46%) saat ini dimiliki oleh satu persen dari penduduk dunia. Ini naik dari sekitar 40% pada tahun 2006.¹⁴ 85 orang terkaya di dunia memiliki kekayaan yang sama dengan yang dimiliki 50% penduduk dunia.
- Tujuh dari sepuluh orang tinggal di negara di mana ketidakadilan ekonomi meningkat dalam 30 tahun terakhir.
- Oxfam memiliki data bahwa satu persen orang terkaya di dunia meningkat kekayaannya di 24 dari 26 negara dari tahun 1980 sampai 2012.

Konteks Indonesia

Kemajuan Terbatas

Sejak tumbangnya Suharto pada tahun 1998, sudah terjadi beberapa kemajuan terkait hak-hak masyarakat di Indonesia.

Ada kebebasan untuk berdemonstrasi dan memilih dalam pemilu serta proses otonomi yang tengah berjalan di Aceh dan Papua. UU Pemerintahan Desa tahun 2014 sekarang menggantikan UU Pemerintahan Desa tahun 1975 yang memaksakan penyeragaman model tata pemerintahan menggantikan berbagai tata pemerintahan adat di Indonesia. UU baru ini, meski belum teruji dan dianggap kontroversial bagi sebagian orang, sepertinya menawarkan lebih banyak peluang untuk pengakuan sistem tata pemerintahan adat.

Mungkin perubahan yang paling penting adalah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 pada bulan Mei 2013 yang mengakui bahwa hutan adat bukanlah bagian dari Wilayah Hutan Negara, namun hutan yang beralas hak. Keputusan ini telah menjadi pemantik momentum untuk reformasi agraria dan menggairahkan gerakan masyarakat adat. Ratusan komunitas telah memancangkan tiang-tiang penanda yang menyatakan wilayah mereka bukanlah bagian dari Wilayah Hutan Negara.

Di seluruh negara ini, berbagai peraturan lokal memberikan sebentuk pengakuan dan perlindungan atas hak-hak komunitas.¹⁵ Komisi Nasional HAM Indonesia juga telah meluncurkan sebuah Inkuiri (Investigasi) Nasional terhadap diskriminasi sistemik terhadap masyarakat adat untuk dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh presiden baru Republik Indonesia. Dalam Pemilihan Umum Presiden 2014, pasangan terpilih Jokowi-Kalla mengeluarkan manifesto yang berisi komitmen rinci untuk menangani hak-hak masyarakat adat.¹⁶

Pada bulan Desember 2014, Presiden memberikan grasi kepada aktivis pembela petani, Eva Bande, yang divonis penjara selama 4,5 tahun karena mengorganisir masyarakat untuk menolak perkebunan sawit di Sulawesi Tengah. Pembentukan kementerian agraria serta peleburan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan mungkin juga menjadi penanda

¹⁴ United Nations University (2006) *Pioneering Study Shows Richest Two Percent Own Half World Wealth*. UNU World Institute for Development Economics Research. Web: http://www.wider.unu.edu/events/past-events/2006-events/en_GB/05-12-2006/ Diakses pada bulan Desember 2006.

¹⁵ Salah satu contoh adalah Perda Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat di Kabupaten Malinau yang mengakui hak-hak kolektif atas wilayah adat.

¹⁶ Jalan Perubahan untuk Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian http://kpu.go.id/koleksigambar/VISI_MISI_Jokowi-JK.pdf Diakses pada bulan Desember 2014.

perubahan yang terjadi. Dan terkait perundangan, RUU Pertanahan akan dibahas di tahun 2015.

Secara keseluruhan, perubahan-perubahan tersebut menambah peluang terbaik bagi terwujudnya pengakuan atas hak-hak masyarakat seperti pada saat euforia awal era Reformasi pasca-Suharto.

Meski timbul harapan, para praktisi, aktivis, dan peneliti yang dilibatkan dalam konsultasi selama penelitian ini menyepakati bahwa persoalan-persoalan yang mendasar masih belum berubah, yaitu:

- Penghancuran sumber daya alam terus berlanjut.
- Hukum dan kebijakan lebih berpihak pada investor dibanding masyarakat.
- Hak-hak masyarakat adat atas wilayah adat mereka tidak diakui. Pada saat buku ini ditulis, RUU Pengakuan dan Perlindungan Hak-hak Masyarakat Adat tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional 2015.
- Belum ada mekanisme nasional (pada saat buku ini ditulis) yang mengakui hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka.
- Pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia terjadi di mana-mana dan umumnya tidak ditindak tegas.
- Tingkat konflik dan perselisihan di wilayah pedesaan terus meningkat.

Para penulis sebuah laporan yang mengkaji situasi reformasi penguasaan hutan di Indonesia menggarisbawahi fakta bahwa meskipun sudah ada Keputusan MK yang bersejarah, tidak ada jaminan bahwa status masyarakat sebagai subjek pemegang hak akan dikembalikan. Para penulis ini menunjuk pada lemahnya kemauan politik dari anggota dewan dan elit pemerintahan, sistem dan kelembagaan negara yang terfragmentasi serta tidak adanya sistem formal yang mengelola proses pengakuan hak-hak.¹⁷

Perluasan Agrobisnis dan Industri Ekstraktif yang Terus Berlangsung

Indonesia memimpin dunia dalam hal emisi gas rumah kaca dari perubahan penggunaan lahan. Ekosistem alami, termasuk lahan gambut kaya karbon, dikorbankan untuk perluasan pertanian monokultur dan pertambangan.

Alih-alih melindungi hak dan kepentingan masyarakat lokal dan pemegang hak atas tanah, pemerintah Indonesia telah lama mendukung pembebasan tanah skala besar lewat kebijakan dan praktik yang ramah terhadap investor. Meskipun perkiraannya cukup bervariasi, dalam dekade mendatang, pemerintah berencana untuk mengembangkan 20 juta hektar perkebunan kelapa sawit baru; hampir 9 juta hektar hutan tanaman industri baru; dan mengonversi 2 juta hektar hutan untuk konsesi pertambangan.

Pada bulan November 2014 Presiden Jokowi membuat pernyataan terkait kegiatan-kegiatan perusahaan sawit dan kertas: *Jika memang mereka merusak ekosistem karena perkebunan monokultur mereka, maka harus dihentikan.*¹⁸

¹⁷ Hal. 2, Rachman, N.F dan Siscawati, M. (2014 tidak dipublikasikan), Laporan tentang Penilaian Reformasi Tenurial Hutan di Indonesia. *Masyarakat Adat* sebagai Subjek Pemegang Hak atas Wilayah Adat setelah Keluarnya Keputusan MK Kasus No 35/PUU-X/2012.

¹⁸ <http://www.theguardian.com/environment/2014/nov/27/indonesia-cracks-down-on-deforestation-symbolic-u-turn> Diakses pada bulan November 2014.

Tetapi, di akhir Februari 2015, Presiden Jokowi mengumumkan rencana pembangunan 9 juta hektar lahan untuk *petani kecil*. Jelas terlihat bahwa model yang dipilih adalah pembangunan pertanian skala besar dengan melibatkan petani dan buruh melalui program transmigrasi, dan kemungkinan dilakukan di lahan-lahan milik masyarakat adat. Pembangunan ini akan mencakup investasi perkebunan tebu skala besar dan perkebunan sawit baru seluas satu juta hektar di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.¹⁹

Erosi Budaya dan Sosial

Demam tanah telah menggerogoti mata pencaharian serta ketahanan pangan di wilayah pedesaan karena masyarakat kehilangan akses terhadap jasa-jasa ekosistem. Investasi raksasa membuat masyarakat nyaris tidak memiliki waktu untuk merefleksikan tentang penentuan nasib mereka sendiri, kelangsungan budaya serta hilangnya bahasa. Data empiris menunjukkan adanya erosi budaya dan bahasa yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. *Atlas Interaktif tentang Bahasa di Dunia yang Terancam* dari UNESCO mengelompokkan 146 bahasa di Indonesia sebagai bahasa yang *rentan, terancam punah, atau punah*.²⁰

Konflik

Perubahan yang cepat pada lanskap dan budaya telah mendorong merebaknya konflik sosial. Setiap minggu selalu ada berita baru tentang konflik tanah yang disertai kekerasan. Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyebutkan bahwa ada tidak kurang dari 14.337 konflik agraria di seluruh Indonesia.²¹

Sebuah surat kabar nasional Indonesia, *Kompas*, menyebutkan situasi tersebut seperti *bom waktu* sengketa lahan yang bisa meletus kapan saja.²² Rencana perluasan berbagai industri agrobisnis dan ekstraktif yang disebutkan di atas kemungkinan akan semakin memperparah dan mempercepat munculnya persoalan ini.

Urbanisasi

Gerakan masyarakat adat dan petani dipengaruhi oleh tren urbanisasi dan transformasi pedesaan yang berlangsung bersamaan. Analisis yang mendalam tentang hubungan tersebut berada di luar cakupan dari publikasi ini, namun ada beberapa hal penting yang muncul dalam wawancara:

¹⁹ Lahan 9 Juta Hektar Segera Dibagikan, *Kompas*, 28 Februari 2015.

<http://print.kompas.com/baca/2015/02/28/Lahan-9-Juta-Hektar-Segera-Dibagikan> , Diakses pada bulan Februari 2015.

²⁰ UNESCO Atlas of the World's Languages in Danger. Situs. <http://www.unesco.org/culture/languages-atlas/> Diakses Februari 2013. Jumlah bahasa-bahasa di Indonesia mungkin lebih sedikit dari yang ada karena peta UNESCO hanya mencakup setengah dari bagian selatan Papua, Nusa Tenggara Timur – NTT, Nusa Tenggara Barat – NTB, Sumatra, atau Kalimantan.

²¹ Contoh-contohnya termasuk penggusuran masyarakat oleh PT Asiatic Persada di Jambi; kekerasan yang dilakukan oleh PT Permata Hijau terhadap 18 perempuan di Maligi, Sumatra Barat; penembakan 6 petani plasma di Rokan Hulu, Riau; Pembunuhan-pembunuhan dan protes yang terjadi di Bima, Sumbawa dan Mesuji, Sumatra Selatan; pembunuhan anak laki berumur 12 tahun oleh Brimob pada bulan Agustus 2012 di Limbang Jaya, Sumatra Selatan karena perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan milik negara.

²² Kompas, "Bom Waktu" Sengketa Lahan, *Kompas*. Situs:

<http://nasional.kompas.com/read/2012/05/28/01421611/.Bom.Waktu.Sengketa.Lahan> Diakses pada bulan Mei 2012.

- Satu alasan mengapa pemuda meninggalkan desa mereka adalah karena ketidakamanan hak-hak tenurial mereka, mereka juga mengalami kekerasan dan intimidasi, dan mata pencaharian serta wilayah mereka terancam oleh proses industrialisasi lanskap yang tengah berlangsung seperti yang disebutkan di atas.
- Pemuda yang terdidik merasa bahwa mereka tidak punya pilihan selain pindah ke kota²³ karena fokus pembangunan adalah pengembangan ekonomi di perkotaan; dan juga berkurangnya ekonomi alternatif di pedesaan. Masyarakat pedesaan mengalami disinsentif politik dan struktural yang membuat mereka berhenti mengembangkan bisnis pengelolaan hutan berbasis masyarakat. Pada saat yang sama, ekonomi perkebunan yang tengah berkembang menciptakan lapangan kerja yang tidak membutuhkan keahlian tertentu, berupah rendah, dan tanpa jaminan kerja.
- Erosi budaya diperparah dengan kepergian pemuda dan mereka yang berbakat. Banyak pemimpin yang lebih tua membicarakan tentang meningkatnya keterpisahan hubungan antara manusia dan alam. Semakin sedikit pemuda yang berbicara dalam bahasa lokal, menerapkan hukum adat atau memiliki pengetahuan mendalam tentang pengelolaan sumber daya alam secara tradisional.
- Ketika pemuda meninggalkan komunitas mereka, perjuangan untuk hak-hak atas tanah mungkin melemah karena sebagian dari orang-orang yang cerdas telah pergi. Roem Topatimasang menjelaskan kasus-kasus di mana *pemuda yang pergi keluar untuk bersekolah adalah mereka yang kembali ke tempat asalnya dan ingin menjual tanah karena dengan cara inilah mereka bisa memasuki dunia 'modern'*.

Kelemahan-Kelemahan dalam Gerakan-Gerakan di Indonesia

Indonesia memiliki banyak LSM, organisasi penelitian, aktivis, akademisi serta gerakan sosial yang bekerja dalam isu-isu hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Mereka sudah melakukan beberapa kampanye yang berhasil, namun kemajuannya jauh dari yang diharapkan di era pasca-Suharto.

Kegagalan relatif ini sebagian besar dapat dijelaskan oleh buasnya perampasan tanah dan dominasi model pembangunan berbasis monokultur. Pada saat yang sama, para peserta lokakarya serta narasumber yang diwawancara yang berbicara pada saat penelitian ini dilaksanakan menunjuk pada kelemahan-kelemahan dalam gerakan-gerakan tersebut sebagai salah satu penyebab kemandekan tersebut.

Analisis di bawah ini tidak berarti bahwa persoalan-persoalan tersebut terjadi di semua organisasi, jauh dari itu. Namun, para responden menunjukkan bahwa hal tersebut adalah kegagalan yang sering terjadi dan berulang dalam situasi yang berbeda-beda. Identifikasi kelemahan-kelemahan tersebut sebaiknya dilihat sebagai seruan untuk melakukan aksi oleh para responden yang ingin memperkuat gerakan-gerakan yang melibatkan mereka.

Hal-hal yang diungkapkan oleh para narasumber yang diwawancara dan peserta lokakarya antara lain:

Kurangnya Investasi untuk Analisis Kritis

²³ Hijrahnya kaum terdidik ke perkotaan serta tantangannya bagi para pemimpin adat akan dibicarakan dengan mendalam dalam bab selanjutnya.

Banyak masyarakat pedesaan kurang memiliki analisis kritis atas situasi mereka, dan persoalan mendasar ini masih belum ditangani secara memadai oleh sebagian LSM. Masyarakat terus mengalami penderitaan akibat kurangnya rasa hormat dan penghargaan pada diri sendiri. Sering kali mereka bahkan kekurangan informasi-informasi dasar tentang berbagai tantangan yang mereka hadapi:

Masyarakat tidak tahu kalau kebijakan negara tidak mengakui keberadaan mereka sebagai masyarakat adat, [serta] hak-hak mereka atas sumber daya alam, seperti wilayah dan hutan, yang setiap hari mereka anggap sebagai milik mereka, karena mereka mewarisiya dari para leluhur yang sudah memiliki tanah tersebut sejak zaman dahulu kala.

-Yati Simanjuntak

Ketika tidak ada proses untuk meningkatkan kesadaran kritis, masyarakat juga lebih sulit untuk mempertahankan kesatuan, atau untuk menganalisis dengan kritis pilihan-pilihan pembangunan yang mereka hadapi.

Pelatihan versus Pendidikan Populer

Pelatihan-pelatihan LSM sering kali merupakan acara-acara berbasis isu yang hanya dilaksanakan satu kali dan ditujukan pada tujuan proyek jangka pendek daripada berdasarkan kajian mendasar akan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagian pelatihan terfokus untuk menghasilkan capaian-capaian bagi penyandang dana dibandingkan menangani tujuan mendasar yang dihasilkan dari penilaian kebutuhan yang dilakukan sebelumnya. Dengan memprioritaskan target advokasi serta aktivisme daripada pendidikan untuk kesadaran kritis, pelatihan-pelatihan seperti itu mungkin tidak akan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Kurangnya Sumberdaya untuk Kepemimpinan Akar Rumput

Para praktisi menyatakan bahwa terlalu sedikit pemimpin akar rumput yang muncul untuk menangani berbagai persoalan yang ada.

Sangat kurang jumlah aktivis-pendidik senior yang memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk memfasilitasi munculnya para pemimpin akar rumput. Para aktivis pendidik senior mengalami kesulitan dalam mencari kerja-kerja dalam pengembangan gerakan. Peluang-peluang yang ada adalah di bidang manajemen, konsultansi, atau advokasi kebijakan, yang akibatnya adalah gerakan akar rumput kehilangan para fasilitator mereka yang paling berpengalaman.

Gerakan-gerakan lokal juga sering kali dipimpin oleh staf LSM dari perkotaan dan terdidik dibanding anggota masyarakat lokal. Meski ada perwakilan masyarakat dalam gerakan-gerakan tersebut, nyaris tidak ada wajah baru, dan sering kali yang menghadiri pertemuan dan konferensi hanyalah *mereka yang biasa melakukannya*.

Jebakan Ketergantungan LSM

Banyak aktivis LSM yang melihat diri mereka sebagai agen perubahan, daripada sebagai fasilitator atau bidan dari gerakan sosial.

Kebingungan akan Peran

Paulo Freire telah mengidentifikasi kebingungan akan peran yang dialami oleh sebagian kelas menengah yang mendukung gerakan-gerakan populer:

Sebagian orang dari kelas dominan bergabung dengan kaum tertindas dalam perjuangan mereka untuk pembebasan. Peran yang mereka mainkan sangat penting dan sudah dilakukan sepanjang sejarah perjuangan. Namun, ketika mereka pindah ke dalam posisi kaum yang tereksplorasi, mereka hampir selalu membawa ciri-ciri asal-usul mereka. Prasangka-prasangka mereka termasuk kurangnya rasa percaya pada kemampuan masyarakat untuk berpikir, berkeinginan, dan memahami sesuatu. Para pendukung tujuan rakyat tersebut secara terus-menerus berada dalam risiko terjebak dalam sejenis kemurahhatian yang sama bahayanya dengan para penindas. Mereka benar-benar ingin mengubah tatanan yang tidak adil, tetapi dikarenakan latar belakang mereka, mereka percaya bahwa mereka harus menjadi pelaksana transformasi. Mereka berbicara tentang masyarakat, tetapi mereka tidak mempercayai mereka. Padahal, mempercayai masyarakat adalah prasyarat wajib untuk transformasi.

- diadaptasi dari Paulo Freire, Pendidikan Kaum Tertindas, hal.60

Masyarakat jarang sekali dianggap sebagai pengambil keputusan utama dalam upaya mengubah situasi mereka sendiri. Sering kali, mereka masih dilihat sebagai *objek* dari pembangunan, atau sumber informasi bagi pemerintah dan LSM; atau sebagai *studi kasus untuk advokasi* bagi para aktivis LSM.

Bahkan ketika intervensi bertujuan mendukung masyarakat mendapatkan hak-hak mereka kembali, kadang-kadang hasilnya bisa berupa meningkatnya ketergantungan material dan psikologis masyarakat pada aktor-aktor dari luar.

Sebagian LSM terus mengklaim masyarakat (ini adalah wilayah KAMI – hanya kami yang bekerja di sini) dan masyarakat diberi sedikit pilihan untuk memutuskan dengan siapa mereka ingin bekerja sama. Sebagian LSM menuntut agar masyarakat menganut filosofi dan sudut pandang mereka daripada mendorong masyarakat untuk berpikir bagi diri mereka sendiri.

Kurangnya Penguatan Struktur Tradisional

Sebagian responden berpendapat bahwa LSM yang bekerja dengan masyarakat bisa secara tidak sengaja meningkatkan pemikiran yang monokultur serta penyeragaman sistem dan kelembagaan. Sebagai contoh, beberapa LSM dan donor mungkin mendorong struktur organisasi yang *baru*, padahal semestinya mereka menghargai dan menguatkan sistem tata pemerintahan tradisional dan mendukung entitas-entitas berpemerintahan sendiri (*self-governing*).

Terlalu sedikit organisasi yang memfasilitasi masyarakat untuk merefleksikan dan merevitalisasi sistem tata pemerintahan tradisional mereka, menolong mereka untuk

memilih pembangunan yang mereka tentukan sendiri. Hal ini sering kali terkait dengan dominasi kampanye reaktif yang dipaparkan di bawah.

Bahasa internasional kadang-kadang menggantikan konsep-konsep lokal. Selain itu, banyak LSM memiliki pendekatan sektoral, memfokuskan pada kesehatan, pendidikan, atau pengelolaan sumber daya alam, sementara masyarakat menilai situasi mereka sendiri dengan cara yang lebih menyeluruh/holistik.

Jebakan Uang

Banyak pendanaan cenderung memotong pengembangan kepemimpinan akar rumput dan pembangunan gerakan jangka panjang karena lebih memilih model yang dipimpin para ahli (*expert-led*) dengan kerangka dari atas ke bawah (*top-down*). Dalam negosiasi-negosiasi pendanaan, banyak lembaga donor yang lebih memilih bekerja sama dengan kelompok-kelompok seperti LSM internasional atau lembaga pemerintah karena memiliki kesamaan wacana daripada bekerja langsung dengan masyarakat. Lembaga donor cenderung berpikir dalam kerangka siklus pendanaan jangka pendek dibanding visi jangka panjang. Banyak donor internasional yang reaktif, mengikuti aliran uang dan tren terkini.

Penerima dana juga kadang sama reaktifnya, seperti yang diungkapkan oleh Yati Simanjuntak dalam wawancara: *Kadang-kadang LSM tidak memiliki ideologi yang jelas. Mereka mengikuti isu-isu yang seksi saja – REDD, hak-hak perempuan, hak asasi manusia. Mereka mengikuti mode dari lembaga penyandang dana mereka.*

Sedikit LSM telah berhasil mengembangkan posisi tawar yang kuat dengan para penyandang dana. Mengingat karakter internasional dari sektor pembangunan, penyeragaman sistem, pemikiran, dan kelembagaan dapat membawa dampak sampingan yang tidak diharapkan dari intervensi-intervensi pembangunan.²⁴

Kampanye Reaktif

Banyak LSM yang lebih memilih untuk menangani advokasi kebijakan dan perubahan legislatif dibanding meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan perangkat perencanaan dan hukum yang ada. Ini sama halnya dengan memiliki ketergantungan yang berlebihan pada harapan bahwa kebijakan di masa depan akan menyelesaikan masalah kekinian.²⁵

Sering kali LSM memfokuskan pada advokasi, merespon pelanggaran atas hak-hak asasi manusia serta ancaman lingkungan daripada memfokuskan pada pembangunan gerakan akar rumput jangka panjang. Reaksi ini sangat bisa dimengerti mengingat mendesaknya upaya-upaya untuk menangani situasi-situasi tersebut, namun dalam jangka panjang kecenderungan ini bisa berdampak pada kurangnya upaya yang dilakukan untuk membangun gerakan untuk perubahan sosial yang lebih besar.

²⁴ Di samping narasumber yang diwawancara, narasumber tambahan dalam bagian ini adalah Pengacara Doming Nahayangan, dan analisisnya tentang hubungan masyarakat dan penyandang dana yang dicatat dalam dokumen proyek *Loket* (2001) DFID MFP dokumen internal.

²⁵ Batasan-batasan dari pendekatan tersebut diakui sejak tahun 117 Sebelum Masehi ketika sejarawan Roma Tacitus mengamati bahwa *hukum paling banyak ketika negara sangat korup*. Tacitus (117 AD) *The Annals of Imperial Rome, Book III*. Situs: berbagai versi.

Tanpa investasi untuk pembangunan gerakan dan kepemimpinan, sekelompok kecil aktivis akhirnya harus menangani masalah-masalah yang lebih besar. Para aktivis akhirnya akan kelelahan secara fisik dan mental karena terlalu banyak pekerjaan dan secara emosional tenggelam dalam persoalan kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi terus-menerus.

Organisasi-organisasi masyarakat sering kali dilahirkan dan dikembangkan untuk melawan pembangunan skala global. Akibatnya, organisasi-organisasi masyarakat mungkin menjadi lemah di akhir kampanye – *entah masyarakat menang atau kalah* – sebab tujuan utama dari pendirian organisasi tersebut sudah berakhir. Sering kali kesatuan dan makna tujuan menjadi hilang ketika organisasi-organisasi tidak memiliki rencana jangka panjang untuk pembangunan yang ditentukan sendiri, khususnya untuk pengembangan alternatif ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

Perusahaan-perusahaan bersabar. Mereka mungkin ditolak ketika pertama kali datang ke wilayah tertentu. Namun, ketika masyarakat memiliki kesadaran kritis yang terbatas dan tidak memiliki rencana yang jelas untuk masa depan mereka, mereka akhirnya akan menerima perusahaan di wilayah mereka.

Mungkin kelemahan yang paling dasar dari pendekatan kampanye satu-satu (satu kali di satu waktu) adalah karena pendekatan itu didorong oleh keputusasaan, keterkejutan, dan ketakutan menghadapi pengrusakan lingkungan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia. Meski hal ini bisa efektif dalam jangka pendek, namun mungkin tidak akan berdampak positif dalam jangka panjang. Untuk mencapai transformasi sosial yang fundamental dan berjangka panjang, akan jauh lebih efektif jika memanfaatkan harapan masyarakat daripada ketakutan mereka.

Pemikiran Monokultur

Tidak Ada Alternatif (TAA)

Pandangan bahwa *tidak ada alternatif* sering kali mempengaruhi perdebatan di Indonesia. Beberapa hal yang menyulitkan pengembangan alternatif antara lain: pembangunan skala besar yang agresif, hukum dan kebijakan yang menguntungkan perusahaan dan mengkriminalisasi masyarakat; penggunaan intimidasi dan korupsi yang memperlemah perdebatan atau resistensi; serta kurang amannya tenurial untuk masyarakat.

Tidak peduli seberapa merusaknya pembangunan yang direncanakan, masyarakat yang terkena dampak sering kali bertanya *jika kami tidak menerima tambang, lalu apa? Jika kami tidak menerima perkebunan, lalu apa?* Masyarakat menerima pertambangan atau perkebunan karena mereka merasa *tidak ada alternatif lain*. Media yang dominan, politisi, pemerintah daerah, dan perusahaan semuanya mengatakan pada mereka bahwa *tidak ada alternatif*.

LSM-LSM disalahkan karena tidak memiliki *solusi* atau *alternatif*. Para perwakilan dari gerakan sosial dan lingkungan terjebak dalam perdebatan palsu di mana mereka diharuskan mencari alternatif-alternatif atas pembangunan industri skala besar bahkan pada saat pembangunan yang direncanakan jelas-jelas akan membawa dampak lebih buruk dibanding situasi yang ada saat ini.

Perdebatan palsu seperti ini telah menjadi senjata ideologis yang ampuh dalam gudang senjata ekonomi dan globalisasi neoliberal. Disebarluaskan oleh media, politisi, dan perusahaan, pemikiran tersebut bahkan mendapatkan singkatan khusus di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Inggris, Margaret Thatcher, pada tahun 1980an, yaitu TINA yang merupakan kepanjangan dari *there is no alternative* (tidak ada alternatif/TAA).

Fokus berbagai gerakan di Indonesia yang sering kali lebih dititikberatkan pada melakukan perlawanan daripada membidani kelahiran dunia yang ingin kita lihat, lebih pada menjelaskan keputusasaan daripada menciptakan harapan, mungkin secara tidak sengaja dapat memperkuat ide tentang tidak adanya pilihan. Karena pendekatan-pendekatan tersebut hanya ada dalam perlawanan menentang model dominan dari peradaban berdasarkan pembangunan industri yang tak terbatas, hal ini semakin memperkuat kesan bahwa gerakan-gerakan dan aksi-aksi perlawanan sudah kalah sebelum bertanding.

Monokultur Pikiran

Ide tentang *Tidak Ada Alternatif* bukan hanya berasal dari pemikiran neoliberal abad 20 atau 21, namun merupakan kelanjutan dari proses panjang peremehan nilai dan penyembunyian pengetahuan di luar sistem budaya dan ekonomi yang berkuasa.

Sebagai contoh, budaya dan pengetahuan adat telah diremehkan oleh berabad-abad penjajahan, dan akibatnya: *yang sakral menjadi biasa, pengetahuan-pengetahuan tertentu dianggap takhayul, pertukaran yang adil serta kepemilikan lahan secara bersama dianggap sebagai tradisi kuno yang melawan arus ekspansi pasar serta kepemilikan pribadi*.²⁶

Filsuf Portugis Boaventura de Sousa Santos menawarkan pemeriksaan yang mendalam tentang bagaimana persepsi tentang tidak adanya alternatif dibangun, seperti yang dijelaskan secara singkat di bawah ini:²⁷

Pengetahuan, kebudayaan, dan seluruh masyarakat dibuat tidak kasat mata oleh paradigma Utara yang dominan yang berasal dari pusat-pusat pembelajaran seperti Oxford, Leiden, atau Berkeley. Apapun yang tidak diakui oleh ilmu pengetahuan modern dinyatakan tidak ada, bodoh, dan terbelakang.²⁸

Kegiatan atau organisasi *internasional*, baik perusahaan multinasional, proses kebijakan global (seperti konferensi iklim), atau LSM internasional, dianggap lebih unggul, dengan mengorbankan inisiatif lokal.

Seluruh tenaga kerja yang ada ditafsirkan untuk melayani ekonomi global dan keuangan. Setiap pekerjaan yang tidak dapat diukur atau dikategorikan demikian (seperti ekonomi adat atau petani) dianggap sebagai non-produktif dan karena itu dianggap tidak ada.

²⁶ Martinic, Sergio, dikutip dalam Kane, L. (2001) *Popular Education and Social Change in Latin America*, Nottingham, UK: Russell Press. hal.15-16

²⁷ Boaventura de Sousa Santos (2009) *Educación Popular y Paradigmas Emancipadores*, La Piragua: Revista Latinoamericana de Educación y Política, Panamá: CEAAL, no. 30. hal.11-32.

²⁸ Pengetahuan yang monokultur dapat membantu menjelaskan mengapa kaum konservatif terbutakan dari kemampuan masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam mereka. Sederhananya, cara pandang dunia yang menjadi landasan konservasi tidak dapat memahami pengetahuan yang ada di depan mata mereka.

Pembangunan dianggap sebagai sebuah proses linier di mana jalur pembangunan negara-negara *maju* dianggap sebagai satu-satunya model yang harus diikuti.

Atas nama proses yang dianggap linier ini, tidak jarang perwakilan pemerintah dan perusahaan berpendapat bahwa *tidak ada alternatif* untuk deforestasi; untuk kerusakan budaya adat; atau untuk hilangnya lahan milik bersama; karena inilah yang telah dilakukan oleh negara-negara Eropa untuk mengembangkan ekonomi mereka.

Memungkinkan untuk Menciptakan Dunia Lain

Menjadi radikal sejati adalah dengan membuat harapan menjadi mungkin, bukan meyakini keputusasaan.

Raymond Henry Williams, ilmuwan politik dan pendidik orang dewasa dari Wales.

Meski ancaman-ancaman perampasan tanah, konflik, erosi budaya, kerusakan lingkungan serta ketidakpastian di Indonesia dan dunia terus membayangi, harapan masih ada. Paulo Freire, seorang pemikir utama *pendidikan populer*, memahami bahwa penindasan membuat kaum tertindas tersudut dalam keputusasaan yang tak berujung di mana perubahan terlihat tidak mungkin diwujudkan. Namun, di sepanjang sejarah, saat-saat penuh keputusasaan ini adalah saat-saat yang diikuti dengan perubahan paradigma yang radikal.²⁹

Kata krisis atau *κρίσις* dari Bahasa Yunani dapat berarti suatu saat yang penuh dengan kesulitan, masalah, dan bahaya yang besar. Namun, kata tersebut juga berasal dari bahasa Yunani kuno yang berarti *aku putuskan*. Dalam pengertian ini, *krisis* merupakan sebuah undangan untuk berpikir kritis,³⁰ yang pada gilirannya akan menabur benih perubahan sosial.

κρίσις = Berpikir Kritis

Menekan Balik

Ada banyak cerita tentang harapan. Perubahan dramatis dapat terjadi tiba-tiba apabila hal tersebut adalah yang paling tidak diharapkan, seperti yang kita lihat beberapa tahun terakhir ini, antara lain: protes *Indignados* di Spanyol yang mengarah pada gerakan Podemos berdasarkan kepemimpinan partisipatoris; *Occupy Movement* (gerakan pendudukan) di seluruh dunia; gerakan pro-demokrasi Turki; gerakan di Brazil untuk reformasi politik; *Idle No More*, gerakan yang semakin berkembang untuk mendorong kebangkitan masyarakat adat di Kanada dan secara global; dan gerakan divestasi minyak yang tumbuh berlipat ganda.

Hilangnya budaya, masyarakat, dan tanah bisa dibalikkan. Sebagai contoh, bangsa Apache, yang digusur 100 tahun lalu, dalam beberapa tahun terakhir telah berhasil merevitalisasi budaya dan bahasa mereka, dan mendapatkan kembali hak-hak atas sebagian wilayah

²⁹ Steinberg, S. *Paulo Freire (1921-1997)*, The Paulo and Nita Freire International Project for Critical Pedagogy. Situs: <http://www.freireproject.org/content/paulo-freire-1921-1997> diakses Agustus 2012.

³⁰ Etymology of crisis (*le mot grec krasis, utilisé à la fois pour désigner la «crise» et la «pensée critique»*) Richard Werly (2012) *Paros, une carte postale contre la crise*, Le Temps. Situs: <http://www.letemps.ch/Page/Uuid/7750e60c-e897-11e1-8e1d-ddab828cee35#.Uc2R7I5bNsQ> Diakses Agustus 2012; Thayer dan Smith (1999) *Greek Lexicon entry for Krisis*, The NAS New Testament Greek Lexicon <http://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/nas/krisis.html> Diakses Maret 2013.

mereka yang dulunya merupakan asal mereka.³¹ Setelah 300 tahun diusir dari tanah mereka untuk pembangunan peternakan domba skala besar, beberapa komunitas di Skotlandia mendapatkan kembali hak-hak mereka atas tanah mereka serta menciptakan alternatif ekonomi yang berkelanjutan, memproduksi energi mereka sendiri dari angin dan mikrohidro, menciptakan lapangan pekerjaan yang memastikan bahwa para pemuda mereka dapat tinggal dan bekerja dalam komunitas sendiri.

Dalam esainya yang terkenal di tahun 1960an, *The Tragedy of the Commons*, ekolog Garret Hardin berpendapat bahwa sumber daya yang dimiliki bersama akan dipanen secara berlebihan dan akhirnya hancur. Namun, bertahun-tahun kemudian, pemenang Nobel di bidang ekonomi, Elinor Ostrom, menyatakan bahwa Hardin *tidak dapat membedakan antara tanah yang terbuka aksesnya dengan tanah yang merupakan hak milik bersama sebuah komunitas*.³² Penelitian-penelitian yang terus berkembang menunjukkan bahwa masyarakat yang memiliki hak-hak yang terjamin, di mana mereka sendiri membuat aturan-aturan terkait tanah milik bersama, sering kali merupakan pengelola dan pelindung hutan serta sumber daya alam lain yang paling efektif. Dalam proses ini, masyarakat-masyarakat tersebut bisa mendapatkan berbagai manfaat dalam hal mata pencaharian, konservasi, budaya, dan penurunan emisi.^{33 34 35 36}

Pemahaman baru ini mempertanyakan pilihan-pilihan kiri-kanan kaum ortodoks tentang kontrol negara versus kontrol swasta atas moda produksi. Meskipun tidak ada obat mujarab, *the commons* (atau hak milik bersama) diakui sebagai sebuah sistem alternatif yang berkelanjutan untuk mengelola dunia.

Di seluruh dunia, gerakan masyarakat adat semakin menolak *logika pilihan zero-sum* antara pertumbuhan ekonomi versus kelestarian lingkungan.

Sebagai contoh, aktivis akar rumput di Amerika Latin berhasil memenangkan pengakuan hak-hak masyarakat adat atas wilayah mereka serta pendidikan dwibahasa antarbudaya di sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Ekuador dan Bolivia telah memberikan status hukum terhadap *Hak Alam (The Rights of Nature)* dan konstitusi kedua negara tersebut telah

³¹ James Anaya, Pelapor Khusus PBB untuk Hak-Hak Masyarakat Adat, bercerita tentang bangsanya dalam perayaan 10 tahun ulang tahun AMAN di Jakarta, 2009.

³² Ostrom, E. (1990) *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. New York: Cambridge University Press, 90.

³³ Penelitian yang dilakukan oleh International Forestry Resources and Institutions tentang kondisi hutan yang berdekatan dengan 178 kelompok pengguna hutan, menemukan bahwa pemantauan dan pemberian sanksi secara teratur dari kelompok-kelompok lokal sangat terkait dengan membaiknya kondisi hutan. Ostrom, E. (2010) *A Multi-Scale Approach to Coping with Climate Change and Other Collective Action Problems*, Solutions. Vol 1, No. 2, hal. 27-36

³⁴ Chhatre dan Agrawal, menggunakan data IFRI, mengaitkan ukuran hutan yang lebih besar dengan otonomi yang lebih besar dalam pembuatan kebijakan di tingkat lokal dengan simpanan karbon yang tinggi serta keuntungan untuk mata pencaharian. Ashwini Chhatre dan Arun Agrawal (2009) *Trade-offs and synergies between carbon storage and livelihood benefits from forest commons*, PNAS 106 (42) 17667-17670.

³⁵ Para peneliti World Bank dan IRRI menemukan bahwa *di Amerika Latin dan Karibia..wilayah adat dua kali lipat lebih efektif dibanding wilayah perlindungan lainnya. Di Asia, wilayah yang sangat dilindungi berfungsi lebih baik dari perkiraan kasar, namun wilayah yang digunakan untuk berbagai fungsi ternyata dua kali lipat lebih efektif* Nelson A, Chomitz KM (2011) *Effectiveness of Strict vs. Multiple Use Protected Areas in Reducing Tropical Forest Fires: A Global Analysis Using Matching Methods*. PLoS ONE 6(8): e22722.

³⁶ Penelitian-penelitian dari Brasil, Nepal, Meksiko, dan Guatemala menunjukkan bahwa pengelolaan hutan oleh masyarakat adat ternyata lebih efektif untuk mengurangi laju deforestasi, emisi dan kebakaran hutan dibanding hutan lindung. David Kaimowitz (2012) *Community & Indigenous Forest Ownership & Management: Potential to reduce forest carbon emissions*, Presentasi powerpoint yang tidak dipublikasikan.

memasukkan konsep adat *Sumak Kawsay*, atau *menjalani hidup dalam kepuasan*³⁷ sebagai salah satu tujuan menyeluruh dari pembangunan. *Sumak Kawsay* merupakan sebuah idealisme leluhur Andes untuk mencapai hidup dalam harmoni dan keseimbangan dengan diri Anda sendiri, antara laki-laki dan perempuan, antar masyarakat serta antarmanusia dan lingkungan alami di mana mereka menjadi bagian darinya.³⁸

Contoh-contoh seperti yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa sejarah belum berhenti; kerusakan mata pencaharian, sumber daya, dan budaya tidak perlu menjadi sesuatu yang tidak dapat dielakkan atau permanen. Prediksi tanpa harapan yang mengatakan bahwa sesuatu tidak akan pernah berubah tidak mesti benar dan mungkin jadi penghalang untuk bertindak.

Memperkuat Gerakan dan Kepemimpinan di Indonesia

Gerakan-gerakan untuk perubahan sosial dan lingkungan yang positif di Indonesia berada dalam posisi yang kokoh untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini dan mengubah realitas di negara ini.

Peristiwa yang unik ini membutuhkan banyak pemimpin lokal yang berbakat, kritis, dan otonom. Dalam jangka panjang, gerakan untuk perubahan sosial akan menjadi kuat apabila memiliki kemampuan untuk menumbuhkan para pemimpin baru. Sebagian besar dari pengetahuan, keterampilan, dan kapasitas untuk mendukung munculnya generasi baru pemimpin akar rumput dan pengembang gerakan ini sudah ada, namun saluran dan kerangka yang bisa membuatnya terjadi perlu diperkuat.

Para responden menawarkan rekomendasi-rekomendasi kunci berikut untuk mewujudkannya:

- Memfokuskan pada pembangunan gerakan, selain advokasi.
- Memfokuskan pada pendidikan untuk kesadaran kritis dalam masyarakat.
- Berinvestasi untuk kepemimpinan masyarakat.
- Memperkuat kelembagaan yang dipilih sendiri oleh masyarakat untuk mewakili mereka.
- Bekerja untuk menghindari intervensi yang disetir oleh para penyandang dana dan budaya ketergantungan.
- Fokus pada kampanye preventif daripada melawan.
- Rumuskan visi Anda sendiri tentang dunia yang lebih baik (bekerja untuk membuat harapan ini terwujud daripada meyakini keputusasaan).

Bab-bab selanjutnya – tentang kepemimpinan, pendidikan populer, pendekatan-pendekatan, kurikulum, silabus, dan rekomendasi – akan memberikan analisis dan saran untuk mendukung munculnya para pemimpin baru untuk memfasilitasi dan mendorong perubahan sosial dan lingkungan yang positif.

³⁷ Kowii, A. (Subsecretary of Education, Ecuadorian Ministry of Education) *El Sumak Kawsay*, UNPFII. Situs: <http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/El%20Sumak%20Kawsay-ArirumaKowii.pdf> Diakses pada bulan Juni 2012.

³⁸ Diadaptasi dari Bizerra, C. (2009) *The Indigenous Decolonial Concept of "Buen Vivir" in Latin America* Foro Social Mundial. Situs: <http://www.indymedia.org.uk/en/2010/02/446813.html> Diakses pada bulan Juni 2012.

Sebuah Publikasi dari:



The
Samdhana
Institute

An Asian Center for Social and Environmental Renewal



Kepemimpinan Akar Rumput dan Pendidikan Populer di Indonesia dilisensikan di bawah:
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License
2015

